

OPINI

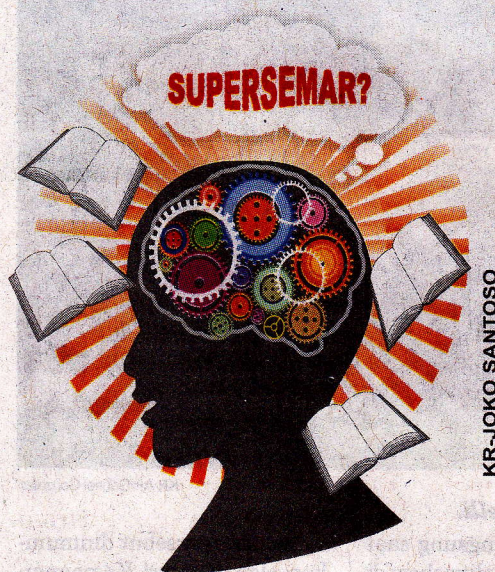
Supersemar dan Tugas Intelektual

Hendra Kurniawan

ngan lalu menjadi plintiran di masa sekarang. Objektivisme inilah yang harus bisa disikapi dengan baik oleh semua pihak.

Kebenaran Sejarah

Terakumulasinya sinisme terhadap sejarah resmi yang selama ini diyakini sebagai kebenaran tunggal melahirkan berbagai wacana alternatif. Terutama soal perlunya historiografi atau penulisan ulang Sejarah Indonesia. Seiring bergulirnya reformasi, upaya meminggirkan peran Soeharto lantas bermunculan.



Hal ini mirip dengan upaya de-Soekarnoisasi pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Gejala sejarah yang sama terjadi berulang atas dua pemimpin bangsa kita ini.

Menariknya meskipun sempat terjadi upaya de-Soekarnoisasi dan kemudian juga muncul (jika boleh disebut) de-Soehartoisasi, namun keduanya menghadirkan romantika tersendiri. Buktinya di masa pemilu kemarin, banyak yang berkampanye dengan menghadirkan sosok Soekarno maupun Soeharto dengan caranya masing-masing. Tentu harapannya dapat mendulang suara dengan 'menumpang' ketokohan kedua Bapak Bangsa ini. Soe-

karno memiliki kekurangan pun demikian Soeharto, namun keduanya memiliki jasa masing-masing yang tak dapat dilupakan oleh rakyat.

Pada akhirnya kebenaran sejarah harus diteruskan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kegamangan masa lalu. M Tullius Cicero mengatakan *iHistoria est testis temporum, lux veritatis, vita memoria, magistra vitae, nuntia vetustatis*. Sejarah adalah tanda zaman, cahaya kebenaran, kehidupan ingatan, guru kehidupan, utusan masa lampau. Memahami sejarah merupakan pelajaran hidup yang akan membuat manusia lebih bijak. Kebenaran sejarah juga penting bagi pembentukan imaji masa lalu yang melahirkan identitas dan integrasi bangsa. Jika ada pelarangan terhadap kegiatan akademik yang hendak menggali dan menyerukan kebenaran sejarah jelas melanggar kehendak bebas manusia yang dilindungi pula oleh konstitusi hidup bernegara.

Berhadapan dengan tugas yang tidak mudah ini, Ery Seda (2015) mengungkapkan bahwa kalangan intelektual harus memiliki integritas personal yang terkait erat dengan integritas akademik. Kaum intelektual, termasuk para sejarawan, memiliki tanggung jawab moral untuk berpihak pada kebenaran. Jangan sampai kaum intelektual hanya bersikap netral sehingga menjadi mandul atau justru melacurkan diri untuk diperebutkan oleh kepentingan tertentu. Bagaimanapun gagasan merupakan senjata yang ampuh dan kebenaran tak akan pernah mati. □ - g

*) **Hendra Kurniawan MPd**, Dosen Pendidikan Sejarah, Juru Bicara Lingkar Studi Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

SURAT Perintah 11 Maret (Supersemar) merupakan momentum penting suksesi kekuasaan di negeri ini. Setelah Soekarno dan Orde Lama tenggelam, muncul sosok pemimpin baru yaitu Soeharto yang mengusung Orde Baru. Sejak itulah Supersemar menjadi 'monumen' yang menegaskan lahirnya pemerintahan baru. Kini hampir setengah abad berlalu, berbagai pertanyaan besar seputar Supersemar perlahan mulai terkuak. Pasca Orde Baru, Supersemar tak lagi dianggap sakral sehingga berkembanglah berbagai pemikiran dan analisis. Tentu tidak semuanya dapat diterima karena dihadapkan dengan fakta sejarah yang tak bisa dipungkiri.

Kontroversi besar mengenai Supersemar sungguh-sungguh ada atau sekadar mitos telah terjawab dalam Pidato Jasmerah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Dalam pidato tanggal 17 Agustus 1966 ini, Presiden Soekarno mengakui keberadaan Supersemar namun ditegaskannya bukan sebagai perintah peralihan kekuasaan. Pidato ini juga secara otomatis menepis dugaan bahwa ada upaya pemaksaan atau todongan senjata di Istana Bogor terhadap Soekarno agar mau menandatangani Supersemar.

Persoalan berikutnya terkait dengan kemunculan berbagai versi Supersemar. Menurut Baskara T Wardaya (2007) setidaknya ada tiga versi salinan Supersemar yang beredar. Versi pertama dan kedua diketik dalam satu halaman dengan kop surat, format pengetikan dan goresan tanda tangan Soekarno yang berbeda. Versi ketiga milik M Jusuf, salah satu jenderal yang ikut menemui Soekarno menjelang keluarnya Supersemar, terdiri dari dua halaman. Hingga sekarang kontroversi ini belum terjawab karena tak ada yang tahu di mana sebenarnya keberadaan naskah yang asli.

Tak hanya Supersemar, masih ada banyak kontroversi sejarah di negeri ini yang perlu diungkap. Sejak dulu sejarah memang tidak bisa lepas dari kepentingan politik penguasa. Akibatnya kebenaran dan kebohongan menjadi sesuatu yang tipis bedanya. Padahal sesuatu yang salah mesti diluruskan, namun yang sudah benar akan tetap benar sehingga ja-